

## B A B IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN  
SUAKA POLITIK TERHADAP WARGA NEGARA LAINA. Tinjauan Terhadap Hak Dan Kewajiban Suatu Negara Terhadap  
Orang Asing.

Telah kita ketahui bahwa hubungan antara rakyat dan negara mempunyai arti yang sangat penting, dimana rakyat merupakan salah satu elemen adanya suatu negara disamping wilayah dan pemerintahan. Pada umumnya tiap-tiap negara mempunyai ketentuan-ketentuan atau peraturan peraturan hukum tersendiri tentang kewarganegaraan didalam wilayah negaranya.

Penduduk suatu negara terdiri dari dua golongan , yaitu sebagai warga negara dan bukan warga negara (orang asing). Keduanya dalam hubungannya dengan negara berbeda bagi orang asing hubungannya hanya selama yang bersangkutan berada dalam wilayah negara tersebut. Sedang untuk warga negara, memiliki hubungan yang tidak terputus dengan tanah airnya meskipun mereka berada di luar negeri.

pada dasarnya setiap negara mempunyai hak atau kekuasaan menerima atau menolak orang asing masuk ke dalam wilayah negaranya. Kebebasan untuk menerima atau me-

nolak orang asing pada umumnya terikat oleh adanya ketentuan atau syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh negara yang bersangkutan.

Seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa orang asing yang masuk kedalam wilayah suatu negara harus sesuai dengan ketentuan hukum yang dibuat oleh negara yang akan menerima orang asing tersebut. Dengan kata lain bahwa orang asing tidak boleh bebas begitu saja masuk dalam wilayah suatu negara.

Apabila mereka sudah diterima masuk dalam suatu negara, mereka harus diperlakukan sama seperti warga negaranya sendiri, tetapi ada pembatasan hak-hak tertentu. Negara yang bersangkutan hanya memberikan perlindungan, terhadap jiwa dan hartanya, selama mereka tunduk kepada hukum negara setempat.

Begitu juga dalam hal-hal yang terkait dengan masalah penolakan orang asing masuk ke wilayah suatu negara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dan dianggap melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan umum dan keamanan negara setempat, maka negara setempat berhak mengusirnya dengan berdasarkan kebijaksanaan yang ada dan tidak boleh sewenang-wenang yang dapat merugikan orang asing tersebut.







kan beban yang berat, mentaati segala ketentuan yang dibuat oleh negara setempat dan tidak menimbulkan kerusakan dalam sistim aturan-aturannya.

Dengan demikian pemerintahan Islam menjamin keamanan mereka dan tidak ada seorangpun yang boleh mengganggu atau memerangi mereka. Sebagaimana pesan Nabi Muhammad s.a.w. :

أَلَا مَنْ ظَلَمَ مَحَاطِدًا أَوْ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ  
أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِبِّ نَفْسٍ قَانًا حُجِيجَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  
(سنن أبي داود : ٣ ، ص : ١٧١)

Artinya:

Ingatlah ! Siapa saja yang berlaku kasar dan kejam terhadap seorang dhimmi, atau memerangi hak-haknya, atau membebaninya dengan beban yang tidak disanggupinya, atau menyalahi kehendaknya, maka saya akan menuntutnya di Hari Kemudian. (Sa'id Ramadhan, 1986:103)

B. Tinjauan Hukum Terhadap Pemberian Suaka Politik Terhadap Orang Asing.

Dalam hukum internasional, pemberian suaka politik merupakan perlindungan yang diberikan oleh suatu negara terhadap warga negara lain (orang asing) atas hak-hak kewarganegaraan tertentu. Pemberian suaka politik ini setiap negara mempunyai kebebasan atau kekuasaan memberi suaka terhadap mereka dengan pertimbangan-pertimbangan khusus, apakah dapat mengganggu stabilitas negara setempat atau tidak.







rikan terhadap mereka yang mencari suaka, tanpa membedakan suku bangsa, agama maupun kedudukannya dan juga mereka telah mengadakan perjanjian damai dengan negara setempat dengan tidak menimbulkan kerusuhan atau kekacauan dalam negara tersebut.

Akan tetapi bagi mereka yang telah melakukan tindak pidana di negaranya (negara non Islam) kemudian pergi mencari suaka di negara Islam, maka mereka tidak dikenakan hukuman menurut Islam. Tapi mendapatkan suaka karena negara tempat perbuatan tersebut dilakukan tidak menerapkan hukum Islam.

Pada bab sebelumnya juga telah disebutkan tentang teori berlakunya Syari'at Islam. Yang mana pada dasarnya syari'at Islam itu bersifat Internasional Universal, tapi dalam prakteknya bersifat regional yang hanya khusus dalam wilayah negara Islam.

Sejalan dengan ini, maka hukum Islam berlaku atas tindak pidana yang dilakukan dalam wilayah suatu negara yang menerapkan hukum Islam, baik pelakunya orang Islam maupun non Islam. Sehingga menurut Imam Abu Hanifah, apabila tindak pidana itu dilakukan di luar wilayah negara Islam kemudian mereka masuk atau kembali ke dalam wilayah negara Islam, maka tidak dijatuhi hukum Islam karena negara Islam tidak mempunyai kekuasaan atas tempat ter-



selain dari itu kemungkinan terdapat pula kerugian yang diperoleh bagi negara maupun warga negaranya, apabila seseorang itu mengganggu kestabilitasan negara tersebut.

Manfaat atau keuntungan bagi mereka yang diberi suaka politik tersebut diantaranya ; dapat hidup berdampingan dengan masyarakat setempat dengan aman, damai dan sejahtera dan mendapat kesempatan untuk bertaubat atas perbuatan jahat yang pernah dilakukan sebelumnya. Karena Allah sendiri mengampuni perbuatan seseorang apabila dia bertaubat atas perbuatannya dengan melakukan amal kebaikan.

الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ  
غَفُورٌ رَحِيمٌ (المائدة : ٣٤)

"Kecuali orang-orang yang bertaubat (di antara mereka-mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (DEPAG RI, 1989:164)

Disamping itu bagi negara maupun masyarakat setempat juga mendapatkan manfaat atau keuntungan dari seseorang yang diberi suaka tersebut, dari pembayaran jizyah atau pajak yang diberikan kepada negara setempat. Selain dari itu negara maupun masyarakat juga dapat mengambil manfaat dari keahlian yang dimiliki oleh mereka, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya dan yang lainnya yang dianggap baik dan tidak bertentangan dengan ketentuan-

